



**P E N E T A P A N**

Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**PERMOHONAN**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, Juli (umur tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman No.5, RT. 00/RW.00, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**.

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penunjukan wali terhadap anak kandung masing – masing sebagai berikut:

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 16Juli200(umur18tahun3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman Jalan Jendral Sudirman No.5, RT. 00/RW.00, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx.

**Nurfadill Alibin Alimuiddin**, tempat dan tanggal lahir Parepare, Oktober200(umur17tahun2 Minggu), agama Islam, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman Jalan Jendral Sudirman No.5, RT. 00/RW.00, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx.

**Tergugat 2**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 2Maret20(umur1tahun7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman Jalan Jendral Sudirman No.5, RT. 00/RW.00, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx.

**Tergugat 3**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25Juli20(umur7tahun3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman

1dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman No.5, RT. 00/RW.00, Kelurahan  
Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx.

## DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON menikah dengan Halima binti Rennu pada hari Jumat tanggal Nopember 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggelangi, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:14/VII/, tertanggal 16 Desember 1999.
2. Bahwa selama PEMOHON dengan Halima binti Rennu berumah tangga, telah di karuniai lima orang anak yang diberi nama, Nurhalisa Ali binti Alimuddin, umur 2tahun, Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, Xxxxxx, umur 17 tahun 2 minggu, Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, Xxxxxx, umur 7 tahun 3 bulan.
3.  
Bahwa anak-anak tersebut yang bernama Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, Xxxxxx, umur 17 tahun 2 minggu, Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, Xxxxxx, umur 7 tahun 3 bulan saat ini belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sehingga masih memerlukan wali.
4. **Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON memiliki Sertifikat sebidang tanah dengan Hak Milik atas nama Ali Nomor: 03081 dengan luas 332 M(tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Makassar;**
5. **Bahwa sertifikat tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak kandung Pemohon dari istri pertama Pemohon, namun pihak dari Notaristersebut tidak menerima berkas Pemohon dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur dan disyaratkan untuk mengajukan Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama.**
6. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama Xxxxxx, (umur 18 tahun 3 bulan), Xxxxxx, (umur 17 tahun 2 minggu), Xxxxxx, (umur 10 tahun 7 bulan), Xxxxxx, (umur 7 tahun 3 bulan) masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali

2dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.

Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masing-masing bernama, XXXXXX, (umur 18 tahun 3 bulan), XXXXXX, (umur 17 tahun 2 minggu), XXXXXX, (umur 10 tahun 7 bulan), XXXXXX, (umur 7 tahun 3 bulan).

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah mendengar keterangannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama Alimuddin dan Halima, nomor 14/01/VII/1999, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tanah Toraja, tanggal 16 Desember 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-1);

3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372022507620001, atas nama Alimuddin, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-2);
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372024505010001, atas nama Nurhalisa Ali, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 3 Juli 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-3);
  4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7372022504110007, atas nama Alimuddin (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-4.).
  5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7372022112110010, atas nama Musmuliadi (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx tanggal 05 Maret 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-5.).
  6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3580/AK/KPP/11/2007, atas nama Nurfadilla Ali, dikeluarkan oleh Dinas KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Desember 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-6);
  7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3579/AK/KPP/11/2007, atas nama Nurfadil Ali, dikeluarkan oleh Dinas KB,
- 4dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Desember 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-7);

8. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-25042011-0008, atas nama Faturrahman, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 25 April 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-8);

9. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-05062014-0020, atas nama Muhammad Faqih Alham, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Juni 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-9);

10. Asli Silsilah Keluarga Alimuddin, dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon (Alimuddin) dan diketahui oleh Lurah Lapadde, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-10);

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372042509140001, atas nama Muhammad Alwan Hafidz, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 24 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-6);

12. Fotocopy Sertipikat tanah Hak Milik, atas nama Ali, No.03081, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi kode (P-12).

5dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

**I.SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon bernama Halima binti Rennu.
- Bahwa saat ini isteri Pemohon tersebut masih hidup.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon (Alimuddin) dengan perempuan bernama Halima telah dikaruniai lima (5) orang anak yaitu Nurhalisa Ali binti Alimuddin, umur 20 tahun, Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, Xxxxxx, umur 17 tahun, Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, Muhammad Faqih Alham bin Alimuddin, umur 7 tahun 3 bulan.
- Bahwa kelima orang anak tersebut semuanya masih hidup dan 4 orang diantaranya belum dewasa masih dibawa umur, yaitu Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, Xxxxxx, umur 17 tahun, Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, Muhammad Faqih Alham bin Alimuddin, umur 7 tahun 3 bulan.
- Bahwa keempat anak Pemohon tersebut saat ini dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon dan isteri sebagai orang tua dan tidak kekurangan sesuatu apapun.
- Bahwa Pemohon adalah Muslim yang taat menjalankan syariat agamanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga.

6dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare





- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat membahayakan anak yang berada di bawa perwaliannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali terhadap keempat orang anaknya yang masih dibawah umur dalam rangka mengurus penghibahan tanah hak milik Pemohon kepada anak-anak Pemohon dari isteri Pemohon yang pertama yang telah meninggal dunia, yang mempersyaratkan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal isteri Pemohon bernama Halima binti Rennu.
- Bahwa saat ini isteri Pemohon tersebut masih hidup.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon (Alimuiddin) dengan perempuan bernama Halima telah dikaruniai lima (5) orang anak yaitu Nurhalisa Ali binti Alimuiddin, umur 20 tahun, Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, Xxxxxx, umur 17 tahun, Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, Muhammad Faqih Alham bin Alimuiddin, umur 7 tahun 3 bulan.
- Bahwa kelima orang anak tersebut semuanya masih hidup dan 4 orang diantaranya belum dewasa masih dibawa umur, yaitu Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, Xxxxxx, umur 17 tahun, Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, Muhammad Faqih Alham bin Alimuiddin, umur 7 tahun 3 bulan.
- Bahwa keempat anak Pemohon tersebut saat ini dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon dan isteri sebagai orang tua dan tidak kekurangan sesuatu apapun.

7dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Muslim yang taat menjalankan syariat agamanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat membahayakan anak yang berada di bawa perwaliannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali terhadap keempat orang anaknya yang masih dibawah umur dalam rangka mengurus penghibahan tanah hak milik Pemohon kepada anak-anak Pemohon dari isteri Pemohon yang pertama yang telah meninggal dunia, yang mempersyaratkan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun terkait dengan alat bukti dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai terdahulu dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Halimah binti Rannu pada tanggal 22 November 1999, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dari ke lima orang anak tersebut, 4 (empat) orang diantaranya belum cukup umur atau belum genap berusia 12 tahun yaitu masing-masing bernama 1).Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, ). Xxxxxx, umur 17 tahun 2 minggu, ). Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, ). Xxxxxx, umur 7 tahun 3 bulan,

8dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat ini belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sehingga masih memerlukan wali, sedangkan instansi yang berwenang dalam hal ini notaris mempersyaratkan harus adanya wali terhadap anak – anak tersebut, maka Pemohon sebagai orang tua kandung akan bertindak menjadi wali terhadap anak kandung tersebut serta bertindak hukum atas semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut, diwakilkan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa bekeanan dengan *Legal Standing* pemohon, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut di atas yang berstatus anak masih dibawah umur untuk bertindak secara hukum untuk kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak – anak Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan dalam rangka proses penghibahan objek sebidang tanah Hak milik, luas 332 M2. dengan sertifikat Nomor 03081 atas nama PEMOHON kepada 2 (dua) orang anak kandung sendiri dari isteri terdahulu, masing – masing bernama *Marlina binti Alimuddindan Faisal Ali bin Alimuddin*, yang oleh pihak Notaris mempersyaratkan harus adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah, ibu dan saudara kandung merupakan orang-orang yang terikat hubungan *nashab* yang secara *ex officio* sekaligus wali, baik terhadap diri maupun segala tindakan hukum untuk kepentingan anak, namun praktik dalam lapangan hukum perdata tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau adanya hubungan hukum, sehingga pada keadaan yang demikian ayah kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing*

9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



(kewenangan dan kepentingan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dimaksud.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara a *quoad* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Parepare untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak – anak kandungnya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anak – anak tersebut yang masih dibawah umur untuk kepentingan pengurusan dalam rangka proses penghibahan, yang pengurusannya mempersyaratkan harus adanya penetapan perwalian dari pengadilan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat-surat (P-1. sampai P-12.), semuanya merupakan bukti outentik dan relevan dengan perkara a *quouse* hingga memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, masing-masing saksi di depan sidang telah memberi keterangan di bawah sumpah, dimana antara keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak - anak bernama 1).Xxxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, ). Xxxxxxx, umur 17 tahun 2 minggu, ). Xxxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, ). Xxxxxxx, umur 7 tahun 3 bulan;

10dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



- Bahwa PEMOHON adalah suami dari perempuan bernama Halimah binti Rennu yang sekaligus sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas;
- Bahwa Alimudidin bin Muhammad (Pemohon) memiliki Sertipikat tanah hak milik dan berkehendak untuk menghibahkannya kepada 2 (dua) orang anak kandungnya dari istreri pertama yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung terhadap anak – anaknya telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang baik dan penuh kasih sayang terhadap anak – anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Muslim yang taat melaksanakan syariat agamanya dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat mengancam dan membahayakan anak-anaknya yang berada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa dengan pelimpahan dan atau penunjukan wali seperti dalam pasal tersebut memberi kekuasaan pada wali yang bersangkutan dan berkualifikasi sebagai orang tua, yang dapat dimaknai bahwa Pemohon (ayah kandung) mempunyai kedudukan dan mengambil peran sebagai wali.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ayah kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri apalagi urusan yang bersifat administratif dari anak kandungnya tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, kuasa hukum demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan ayah

11dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



kandung mewakili anak kandungnya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan hal-hal diluar kemampun yang harus dilakukan oleh anak kandungnya sendiri

Menimbang, bawah dengan demikian yang menjadi isu dan permasalahan penting dalam permohonan tersebut adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung, dalam hal ini diwakili oleh Pemohon yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anak kandungnya, dengan realita praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang perwalian dengan tuntutan dari asas atau prinsip dari praktik keperdataan merupakan di luar kekuasaan Pemohon sebagai wali yang hendak mengurus kepentingan administratif anak kandungnya, hal ini harus dapat diatasi dengan tanpa mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan perwalian terhadap yang bersangkutan, adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan memperlakukan yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang mengemuka dipersidangan menunjukkan bahwa bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai ayah kandung sekaligus wali bagi anak - anak kandungnya tersebut dengan menunjukkan prilaku dengan penuh rasa kasih sayang, baik, jujur, amahah dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohont tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon quo terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama, dimana Pemohon mempunyai kepentingan

12dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



terhadapnya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan ketentuan perubahannya masing-masing Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (*PEMOHON*) sebagai wali terhadap anak – anak bernama 1).*Xxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, ). Xxxxxx, umur 17 tahun 2 minggu, ). Xxxxxx, umur 10 tahun 7 bulan, ). Xxxxxx, umur 7 tahun 3 bulan;*
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Parepare, pada hari Senintanggal 1November 2021bertepatan dengan25 Rabiul Awal 1443 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan AgamaParepareyang terdiri dari **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. danPadhlilah, Mus.,S.HI., MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Sitti Sania, SH.**sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

**Drs. Ilyas**

13dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare



Ttd.

**Padhlilah Mus, S.Hi., MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Hj. Sitti Sania, SH.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	50.000,-
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp	.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

14dari 14 hal. Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA. Pare